

Kerjasama Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang

Sri Mulyani

Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UNTIDAR
Jl. Kapten S. Parman No. 39 Magelang 56116 INDONESIA
Email: mulyanihartomo@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received

Received in revised form

Accepted

Keywords

Kerjasama

Pemerintah-Swasta

Parkir

Kemitraan

Kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public Private Partnership*) dipandang penting untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat termasuk dalam pengelolaan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemitraan dalam pengelolaan parkir sebaiknya dilakukan antara PD Pengelola Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng dengan pihak swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kemitraan pengelolaan parkir antara PD POW Taman Kyai Langgeng dengan pihak swasta harus dilakukan karena akan membawa dampak baik dan saling menguntungkan. (2) Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan parkir di Taman Kyai Langgeng tidak hanya antara pemerintah dan pihak swasta tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat

1. PENDAHULUAN

Kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta merupakan terobosan yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip

tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang dewasa ini telah menjadi *trend* atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan

adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat (*civil society*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang ditawarkan oleh [1], adalah konsep kemitraan pemerintah dan swasta. Pendekatan Kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public Private Partnership*) dipandang penting untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah, baik berupa keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia maka keterlibatan sektor privat penting dalam urusan publik untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat salahsatunya adalah urusan pengelolaan parkir yang sering menjadi masalah di kota-kota besar. [2]mengartikan *Public Private Partnerships* (PPPs) merupakan suatu persetujuan atau kontrak, antara kesatuan masyarakat yang diwakili oleh pemerintah dengan sektor swasta untuk menyediakan layanan publik.

Permasalahan perparkiran yang terjadi di obyek wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang adalah pengelolaan perparkiran yang masih menjadi perebutan antara Perusahaan Daerah Pengelola obyek wisata Taman Kyai Langgeng dengan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar obyek wisata. Keadaan ini bisa dilihat dari lahan parkir yang terpecah menjadi dua lokasi yaitu digarasi rumah penduduk yang berada di depan pintu masuk obyek wisata dan lahan parkir

yang disediakan oleh pengelola obyek wisata.

Masalah keamanan dan tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Magelang menjadi salah satu sorotan dalam perparkiran di obyek wisata Taman Kyai Langgeng. Banyaknya sepeda motor dan kendaraan roda empat yang keluar masuk dari garasi rumah penduduk ke jalan raya menjadikan gangguan keamanan dan keselamatan bagi pengunjung obyek wisata dan memacetkan jalan diseputar obyek wisata.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan parkir dan alternatif pelaksanaan kemitraan pengelolaan parkir di obyek wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Konsep Kemitraan

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut [3], kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum meliputi:

- a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-

- masing pihak merupakan “mitra” atau “*partner*”.
- b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama.
 - c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor swasta, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.
 - d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.

[4] memperkenalkan pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep *hollow state*, dimana bentuk kemitraan dalam konsep ini pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan (*contracting out*) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya menangani urusan yang esensial saja. Dalam konsep ini ada 3 hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta :

a. Tipe Mekanisme.

Mekanisme yang terdapat dalam *hollow state* yang membedakan dengan pemerintahan pada umumnya adalah mekanisme birokrasi, dimana dalam *hollow state* memiliki sedikit order/perintah dan mekanisme control. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah dan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mekanisme pada pemerintahan termasuk didalamnya adalah dana, bantuan kontrak dan kesepakatan, dan tidak berdasarkan semata-mata pada otoritas dan sanksi dari pemerintah. Dimensi mekanisme dalam *hollow state* melihat tiga tipe mekanisme yaitu mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi. Ketika pemerintah mampu menjadi *inti agency* dalam mengontrol mekanisme kemitraan maka proses kemitraan tersebut dilihat dari perspektif *hollow state* bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektifitas kerja sama bisa dicapai dengan baik. Sebaliknya ketika mekanisme dalam proses kemitraan/kerja sama terpisah-pisah, dan tidak terlihatnya pemerintah dalam perannya sebagai inti agensi, maka mekanisme tersebut terfragmentasi.

b. Tipe Struktur

Dimensi kedua dalam teori *hollow state* fokus pada tipe struktur yang terdapat dalam suatu kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada pihak swasta. Pembahasan struktur dalam *hollow state* tidak pada pemahaman konvensional mengenai struktur

organisasi/kerja pada suatu kemitraan, melainkan membahas tentang peran dan tugas aktor-aktor yang terlibat pada kegiatan kerja sama. Tipe struktur dalam teori *hollow state* menyatakan bahwa struktur akan efektif ketika jaringan aktor-aktor terintegrasi dimana hanya ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Struktur ini memfasilitasi terciptanya integrasi dan koordinasi dan relative lebih efisien. *Shared power* akan menjadikan suatu lembaga menjadi lebih efektif. Pemerintah dan swasta bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, akan tetapi pemerintah tetap menjaga fungsi system integrasi dengan bertanggung jawab dalam hal negosiasi, monitoring dan evaluasi kontrak. Hal-hal yang bersifat ***rule oriented*** bukan menjadi focus dan tidak terlalu ditonjolkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Tipe Insentif

Tipe ketiga dalam *hollow state* yaitu insentif. Pengertian Insentif berdasarkan perspektif ini merupakan hal-hal yang diberikan oleh pihak pemberi kerja (pemerintah) kepada pihak swasta dalam proses kemitraan yang dilakukan agar program kerja sama tersebut dapat berlangsung dengan efektif. Efektifitas suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi oleh insentif yang terintegrasi. Teori ini mengemukakan bahwa pendanaan yang baik akan menunjukkan performa atau kinerja yang lebih baik dibandingkan sistem pendanaan yang minim ketika ada kesesuaian antara

tingkat kewajiban dari pendanaan dengan desain kelembagaan atau kemitraan. Di samping itu stabilitas hubungan antar agen berpengaruh terhadap peningkatan modal dan harga. Sistem yang stabil, meskipun didesain secara minim atau pendanaan tidak cukup, memungkinkan individu atau lembaga yang terdapat didalamnya mampu untuk memecahkan masalah dan menyepakati pembagian kerja dalam sistem tersebut. Stabilitas memberikan keyakinan bahwa kerjasama akan memberikan hasil yang baik karena adanya rencana tindakan yang pasti seperti kepastian berinvestasi artinya jika mereka berinvestasi untuk jangka panjang maka akan berpeluang untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut memberikan insentif kepada provider untuk mengatasi masalah tindakan kolektif menjadi milik mereka.

Ciri lain dari *hollow state* adalah menjadikan sektor swasta sebagai sebuah model kesuksesan dan pengelolaan terhadap lingkungan organisasi publik.

2.2 Model Kemitraan

Secara umum, model kemitraan dalam sektor kesehatan dikelompokkan menjadi dua [3] yaitu:

a. Model I

Model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jaring kerja (*networking*) atau *building linkages*. Kemitraan ini berbentuk jaringan kerja saja. Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari

perencanaannya, pelaksanaannya hingga evaluasi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik lainnya.

b. Model II

Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibandingkan model I. Hal ini karena setiap mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama. Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama.

Menurut Beryl Lvinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu:

a. *Potential Partnership*

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain

tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat.

b. *Nascent Partnership*

Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal.

c. *Complementary Partnership*

Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan pertambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti *program delivery* dan *resource mobilization*.

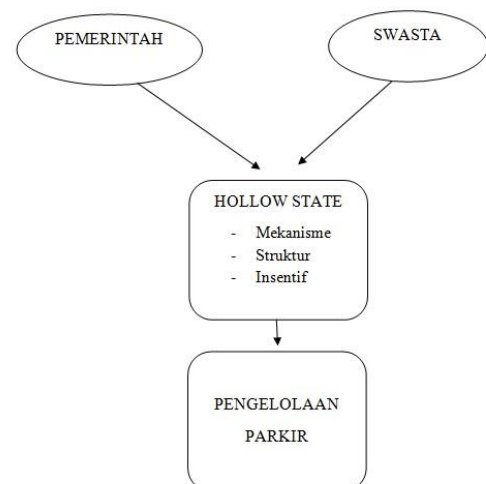
d. *Synergistic Partnership*

Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

2.3 Kerangka Pikir

Kemitraan pemerintah dan swasta merupakan program strategis yang penting dilakukan sebab tidak mungkin seluruh permasalahan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri. Oleh karena itu perlu dikembangkan kemitraan antara pemerintah dengan berbagai pihak, baik sektor swasta ataupun sektor ketiga melalui skema kemitraan pemerintah daerah. Menurut [4] dalam konsep hollow state yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan intensitas pihak ketiga pelaksanaan program-program pembangunan dari pemerintah, Dalam konsep ini ada 3 hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta : (1) Mekanisme, (2) Struktur dan (3) Insentif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep hollow state untuk melihat model kemitraan antara pemerintah dan swasta,

adapun kerangka pikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka Pikir

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipakai karena peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang

pengelolaan parkir di obyek wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang dan menganalisa tentang kemungkinan melakukan kemitraan dengan pihak swasta agar diperoleh dampak yang lebih baik bagi pengembangan obyek wisata dan masyarakat di sekitar obyek wisata.

Secara umum sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan.
- b. Data sekunder yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk dapat membangun sebuah abstraksi tentang tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan, sehingga sifat penyusunannya adalah dari kesimpulan umum ke khusus.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Observasi* (pengamatan) langsung di lapangan,
- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan kunci dengan menggunakan alat penelitian verbal (*voice recording*) dan Dokumentasi.
- c. Analisis dokumen, dengan mengumpulkan data yang sudah disediakan (data sekunder) dari pemerintah, dan lain-lain berupa buku, literature, artikel, serta dokumenlainnya yang dapat mendukung kelengkapan data yang diperlukan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* [5]

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah membangun kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik. Sesuai pendapat Selsky dan Parker serta hasil survei Gazley dan Brudney dikutip [6] kemitraan penting dikembangkan karena alasan: (1) penyelenggaraan pelayanan publik membutuhkan biaya yang semakin besar yang tidak mungkin dipenuhi hanya dengan mengandalkan sumberdaya pemerintah. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi mereka menuntut adanya kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang semakin tinggi, sementara kapasitas pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan relatif semakin terbatas. Kemitraan memungkinkan adanya pelibatan sumberdaya non pemerintah untuk penyelenggaraan layanan publik sehingga cakupan pelayanan menjadi semakin besar (2) menguatnya demokratisasi telah menguatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil di daerah dengan spektrum kegiatan yang cukup luas. Partisipasi mereka dalam penyelesaian masalah publik sangat besar. Menguatnya sektor korporasi dan masyarakat sipil belakangan ini telah menjadikan mereka alternatif pelayanan publik yang produsen potensial (3) krisis kepercayaan yang dialami

baik institusi pemerintah ataupun swasta selama ini sebagai akibat dari kegagalan mereka dalam merepon kebutuhan dan kepentingan publik dapat menjadi justifikasi perlunya mengembangkan kemitraan antara pemerintah dan swasta. Kegagalan mereka merespon masalah dan kepentingan publik ketika mereka bekerja sendirian dapat dihindari ketika mereka berkemitraan. Ketika kemitraan antara pemerintah dan swasta mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik maka kredibilitas dari institusi pemerintah dan swasta yang terkait dengan sendirinya akan semakin meningkat. Kemitraan dapat menghasilkan penghematan biaya penyelenggaraan layanan publik, mengurangi kompetisi memperebutkan sumberdaya dan meningkatkan akses terhadap relawan dan sumberdaya lainnya.

Regulasi tentang kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerjasama antar penyelenggara. Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksudkan ini adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Selanjutnya pada ayat (2) kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan apabila tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan atau keadaan darurat.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir mendefinisikan parkir adalah keadaan

kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya sedangkan fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Mengacu pada definisi tersebut maka penyelenggaraan parkir oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari pelayanan umum yang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menempatkan kendaraannya di suatu tempat tertentu.

Pengelola obyek wisata TKL menyediakan lokasi parkir yang mampu menampung 350 sepeda motor, 200 mobil dan 150 bus yang akan berwisata di obyek wisata TKL. Namun demikian pemanfaatan fasilitas parkir ini belum maksimal karena pengunjung khususnya yang menggunakan kendaraan roda dua tidak seluruhnya memanfaatkan lokasi parkir ini. Hal ini disebabkan jarak yang cukup jauh antara lokasi parkir dan gerbang masuk obyek wisata TKL yaitu gerbang masuk parkir TKL berada pada jalur utama Jalan Panembahan Senopati sedang loket masuk obyek wisata TKL terletak di jalan Cempaka sehingga untuk mencapai loket pintu masuk pengunjung harus berjalan cukup jauh karena harus menyeberang melewati jalan Cempaka. Keadaan ini menimbulkan permasalahan karena jalan Cempaka menjadi akses bagi kendaraan yang menuju ke beberapa tempat seperti SMPN 7 Magelang, Hotel Puri Asri, Oxalis Regency dan pada ruas jalan ini juga terletak rumah dinas Walikota Magelang.

Kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas disekitar obyek wisata menjadi hal yang dikeluhkan oleh pengguna jalan dan dapat menimbulkan kerawanan serta ancaman keselamatan pengunjung. Dampak lain adalah

mengurangi pemasukan retribusi dan pajak parkir bagi pengelola obyek wisata TKL karena kendaraan pengunjung yang diparkir di garasi rumah penduduk tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah. Pengusahaan parkir oleh masyarakat sekitar obyek wisata TKL ini tidak mudah untuk ditertibkan karena menjadi sumber penghasilan masyarakat yang sudah turun temurun dari masa yang lampau. Mencermati konflik yang terjadi antara pengelola obyek wisata dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar obyek wisata ini maka upaya kemitraan dalam pengelolaan parkir ini diharapkan memberikan alternatif solusi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Latar belakang melakukan kemitraan dalam pengelolaan parkir obyek wisata TKL karena adanya konflik antara pihak pengelola dan penduduk setempat yang menghendaki adanya pendapatan finansial dengan adanya obyek wisata TKL. Alternatif kemitraan akan dibahas dengan menggunakan teori *Hollow State* yaitu tinjauan dari dimensi mekanisme, struktur dan insentif. Pada dimensi mekanisme ini pemerintah diharapkan sebagai agensi inti yang melakukan kontrol terhadap mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi. Sesuai dengan prinsip kemitraan yaitu memberi keuntungan kepada kedua belah pihak maka dengan memihak ketigakan parkirnya maka pengelola TKL tidak lagi menyediakan sumberdaya manusia untuk mengelola perparkiran serta tidak menyediakan modal yang besar untuk mengelola perparkiran karena ketika bekerjasama dengan pihak swasta penyediaan sumberdaya manusia, finansial serta infrastruktur sudah menjadi tanggung jawab pihak swasta.

Besaran keuntungan yang didapatkan oleh pengelola TKL dan pihak swasta didasarkan pada pendapatan per bulan dalam pengelolaan parkir yaitu besaran keuntungannya didasarkan pada pembagian laba operasional dengan rincian 70% untuk pengelola obyek wisata TKL dan 30% untuk pihak swasta. Kemanfaatan yang diperoleh pengelola TKL adalah (1) pengelola dapat melaksanakan kewajibannya memberikan layanan pariwisata dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan layanan perparkiran yang teratur dan (2) pemerintah dapat melakukan penghematan pengeluaran biaya pengelolaan Perpustakaan. Manfaat bagi pihak swasta yaitu memberikan keuntungan ekonomis dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Kewajiban pengelola obyek wisata TKL adalah menetapkan perjanjian kontrak berupa *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara kedua belah pihak berkenaan dengan pemeliharaan dan perbaikan lahan parkir serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak swasta.

Pada dimensi struktur, pihak pengelola obyek wisata TKL membangun jaringan yang terdiri dari aktor-aktor yang berkepentingan dengan pengelolaan dan pengembangan fasilitas parkir di obyek wisata TKL. Jaringan ini bersifat sentralistik dengan tanggung jawab utama pada pemerintah atau pengelola obyek wisata TKL oleh karenanya pengelola TKL memberikan fasilitas untuk melakukan koordinasi diantara aktor-aktor tersebut. Hal yang menjadi perhatian dalam dimensi struktur ini adalah pembagian peran dan tugas semua aktor yang terlibat dalam kemitraan yaitu pengelola, pihak swasta dan masyarakat sehingga setiap aktor mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Pembagian peran dan tugas yang jelas dan dipahami bersama

oleh para aktor akan meniadakan konflik yang selama ini terjadi dalam pengelolaan parkir di obyek wisata TKL.

Dimensi insentif ditujukan untuk memberikan kepastian keuntungan kepada pihak swasta yang melakukan kemitraan dalam pengelolaan parkir di obyek wisata TKL. Berdasarkan pada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelola obyek wisata TKL dan perda parkir serta perda lain berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah maka insentif yang diberikan pada pihak swasta harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah karena pengelola obyek wisata TKL berbentuk perusahaan daerah yang bertanggung jawab pada Walikota Magelang. Selanjutnya pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang kemitraan pengelolaan parkir di obyek wisata Taman Kyai Langgeng agar apabila terjadi konflik dalam pengelolaannya dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang mengaturnya.

5. SIMPULAN

a. Kesimpulan

Konsep *Public Private Partnership* (PPP) merupakan konsep yang ditujukan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kebutuhan akan kemitraan ini karena pemerintah memiliki keterbatasan baik dari sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial dan aspek penunjang lainnya. Pengelolaan parkir di obyek wisata Taman Kyai Langgeng memerlukan kemitraan dengan pihak swasta dalam upaya memberikan pelayanan parkir yang lebih baik dan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan obyek wisata.

b. Implikasi

1. Kemitraan dalam pengelolaan parkir mendorong diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur kemitraan pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
2. Menuntut organisasi pemerintah daerah untuk mengadopsi manajemen swasta yaitu menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal seperti melakukan privatisasi dan kontrak manajemen.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Osborne D,& Ted G.(1992).Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Addison-Wesley.
- [2] Parente W. J. , 2006, "Public Private Partnerships" dalam Workshop on "Fundamental Principles and Techniques for Effective Public Private Partnerships in Indonesia", Jakarta.
- [3] Notoadmodjo, Soekidjo, 2007, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [4] Provan, Keith G. and Milward H.Brinton, Governing the Hollow State (Journal of Public Administration Research and Theory), 364/J.Part.10, April, 2000.
- [5] Sugiyono. 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta. Bandung
- [6] Dwiyanto Agus, 2010, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta